

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Kantor Camat Praya Barat Daya merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Lombok Tengah.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Praya Barat Daya Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Renja Kecamatan Praya Barat Daya menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Lombok Tengah ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Awal Renja Kecamatan Praya Barat Daya memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Praya Barat Daya, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan Praya Barat Daya.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Surat Edaran Bupati Lombok Tengah Nomor : 050/278/BAPEDA tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2021.

### 1.3 Maksud dan tujuan

#### 1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kantor Camat Praya Barat Daya adalah sebagai berikut :

- a. untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Praya Barat Daya dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Praya Barat Daya Tahun 2023
- d. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023
- e. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Praya Barat Daya.

#### 2. Tujuan

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Praya Barat Daya adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Praya Barat Daya dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan;
- b. Mewujudkan perencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi/ kantor/ UPT / D di Kecamatan Praya Barat Daya.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Praya Barat Daya adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Hasil Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu

Pelaksanaan Renja Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan Bupati kepada kecamatan. Renja Kecamatan Praya Barat Daya Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal, semua kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan dan mencapai target yang ditetapkan, meskipun realisasi anggaran tercapai 94,87%.

Program yang dilaksanakan oleh kecamatan hanya terdiri dari 6 program dan beberapa kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
  - Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban
  - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa
  - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil Capaian Program Kegiatan dan Realisasi Anggran pada Tahun 2021 Pada Kecamatan Praya Barat Daya Adalah dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sebagai Berikut :

TABEL 2.1

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pada Kantor Camat Praya Barat Daya

No.	Uraian/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	TARGET	Realisasi			SISA ANGGARAN	Keterangan
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)		
1	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Kegiatan	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.759.241	38.759.241	100,00	38.759.241	100,00	-
	1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-
			BELANJA BARANG DAN JASA	-	-	-	-	-
			- <i>Belanja Bahan Bakar dan Pelumas</i>	2.580.000	2.580.000	100,00	2.580.000	100,00
			- <i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	1.027.180	1.027.180	100,00	1.027.180	100,00
			- <i>ATK</i>	25.027.061	25.027.061		100,00	

						100,00	25.027.061			-	
			-	<i>Makan dan Minum</i>	10.125.000	10.125.000	100,00	10.125.000	100,00		-
						-					-
		2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.608.571.702</b>	<b>1.400.439.670</b>	<b>76,52</b>	<b>1.538.740.335</b>	<b>95,66</b>		<b>69.831.367</b>
		1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan		-	-				-
				<b>BELANJA PEGAWAI</b>		-	-				-
			-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.608.571.702	1.400.439.670	76,52	1.538.740.335	95,66		69.831.367
						-	-				-
		2		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<b>12.044.000</b>	<b>12.044.000</b>	-	<b>12.044.000</b>			-
				<b>BELANJA Tambahan Pnghasilan</b>		-	-				-
			-	<i>Belanja Honorarium</i>	8.204.000	8.204.000	100,00	8.204.000	100,00		-
				<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>		-	-				-
			-	<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	3.840.000	3.840.000			100,00		

Rencana Kerja (Renja) Kec. Praya Barat Daya Tahun 2023

						100,00	3.840.000			-	
						-				-	
				<b>BELANJA PEGAWAI</b>		-				-	
<b>3</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>44.497.352</b>	<b>44.482.352</b>	<b>80,37</b>	<b>44.482.352</b>	<b>99,97</b>		<b>15.000</b>
	<b>1</b>			<i>Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		-	-			-	
				<b>BELANJA BARANG JASA</b>		-	-			-	
				- <i>Belanja Cetak</i>	<i>12.695.540</i>	<i>12.695.540</i>	<b>95,36</b>	<i>12.695.540</i>	<b>100,00</b>		-
				- <i>Belanja Pengandaan</i>	<i>4.491.000</i>	<i>4.491.000</i>	<b>32,46</b>	<i>4.491.000</i>	<b>100,00</b>		-
				<i>Belanja Materai</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.800.000</i>	<b>75,00</b>	<i>4.800.000</i>	<b>100,00</b>		-
				<i>Belanja Alat Kebersihan</i>	<i>9.940.000</i>	<i>9.925.000</i>	<b>75,00</b>	<i>9.925.000</i>	<b>99,85</b>		<b>15.000</b>
				<i>Belanja Alat Listrik</i>	<i>4.193.762</i>	<i>4.193.762</i>	<b>64,14</b>	<i>4.193.762</i>	<b>100,00</b>		-
				<i>Belanja Sewa Kursi</i>	<i>6.444.000</i>	<i>6.444.000</i>	<b>100,00</b>	<i>6.444.000</i>	<b>100,00</b>		-
				<i>Belanja Sewa Terop</i>	<i>1.933.050</i>	<i>1.933.050</i>	<b>100,00</b>	<i>1.933.050</i>	<b>100,00</b>		-

					-	-				-	
	2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100,00</b>		-	
			- <i>Belanja Komputer</i>	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00		-	
			- <i>Belanja Printer</i>	6.000.000	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00		-	
	3		<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>28.728.050</b>	<b>28.728.050</b>	-	<b>28.728.050</b>	<b>100,00</b>		-	
			<b>BELANJA MODAL</b>		-	-				-	
			- <i>Belanja Alat Pendingin</i>	28.728.050	28.728.050	-	28.728.050	100,00		-	
	4		<b>Penyedia Bahan Logistik Kantor</b>	<b>19.125.000</b>	<b>19.113.000</b>	<b>68,04</b>	<b>19.113.000</b>	<b>99,94</b>		<b>12.000</b>	
			- <i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	19.125.000	19.113.000	68,04	19.113.000	99,94		12.000	
			<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>	<b>14.120.000</b>	<b>14.086.200</b>	<b>11,60</b>	<b>14.086.200</b>	<b>99,76</b>		<b>33.800</b>	
			- <i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	14.120.000	14.086.200	11,60	14.086.200	99,76		33.800	
					-	-				-	
4			<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan</b>		-						



			<b>Pemerintah Daerah</b>			-				-	
	<b>1</b>		<b>Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>20.032.000</b>	<b>17.337.112</b>	<b>72,22</b>	<b>18.959.928</b>	<b>94,65</b>		<b>1.072.072</b>	
			<b>BELANJA BARANG/JASA</b>		-	-				-	
			- <i>Belanja Tagihan Air</i>	682.500	188.480	<b>6,90</b>	282.720	<b>41,42</b>		<b>399.780</b>	
			- <i>Belanja Tagihan Listrik</i>	7.532.000	6.201.132	<b>63,86</b>	6.859.708	<b>91,07</b>		<b>672.292</b>	
			- <i>Belanja Langganan Surat Kabar</i>	3.480.000	2.610.000	<b>75,00</b>	3.480.000	<b>100,00</b>		-	
			- <i>Belanja Langganan WIFI</i>	8.337.500	8.337.500	<b>100,00</b>	8.337.500	<b>100,00</b>		-	
					-	-				-	
	<b>2</b>		<b>Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		-	-				-	
			<b>BELANJA BARANG/JASA</b>		-	-				-	
			- <i>pekerjaan</i>		-	-				-	
			- <i>pekerjaan</i>		-	-				-	
<b>5</b>			<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>29.111.715</b>	<b>29.070.000</b>	<b>99,86</b>	<b>29.070.000</b>	<b>99,86</b>		<b>41.715</b>	

Rencana Kerja (Renja) Kec. Praya Barat Daya Tahun 2023

	1		<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>		-	-				-	
			<b>BELANJA MODAL</b>		-	-				-	
			- <i>Belanja Kursi Lipat</i>	29.111.715	29.070.000	99,86	29.070.000	99,86		41.715	
					-	-				-	
6			<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>82.387.000</b>	<b>77.194.250</b>	<b>38,08</b>	<b>80.980.399</b>	<b>98,29</b>		<b>1.406.601</b>	
	1		<b>Belanja Bahan Bakar dan Pelumas</b>		-	-				-	
			- <i>Belanja Premium</i>	62.307.000	59.553.750	27,85	62.257.399	99,92		49.601	
			- <i>Belanja Jasa Pelayanan Umum</i>	4.800.000	4.000.000	75,00	4.800.000	100,00		-	
			- <i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</i>	3.200.000	1.560.500	48,77	1.843.000	57,59		1.357.000	
			- <i>Belanja Suku Cadang</i>	3.580.000	3.580.000	48,77	3.580.000	100,00		-	
			- <i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	8.500.000	8.500.000	88,24	8.500.000	100,00		-	
	2		<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya</b>	<b>9.600.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>58,33</b>	<b>9.600.000</b>	<b>100,00</b>		-	
			- <i>Belanja Jasa Pelayanan Umum</i>	9.600.000	6.400.000			100,00			

Rencana Kerja (Renja) Kec. Praya Barat Daya Tahun 2023

						58,33	9.600.000			-	
7			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tk. Kecamatan</b>		-	-				-	
	1		<b>Koodinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	18.000.000	18.000.000	50,00	18.000.000	100,00		-	
			- <i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	18.000.000	18.000.000	50,00	18.000.000	100,00		-	
8			<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	22.385.500	21.386.364	92,66	22.385.364	100,00		136	
	1		- <i>Belanja Premium</i>	10.642.500	10.642.500	100,00	10.642.500	100,00		-	
			- <i>Belanja ATK</i>	1.349.000	985.864	73,08	1.348.864	99,99		136	
			- <i>Belanja Cetak</i>	644.000	644.000	644.000,00	644.000	100,00		-	
			- <i>Belanja Pengandaan</i>	750.000	114.000	15,20	750.000	100,00		-	
			- <i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00		-	
9			<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	85.895.410	73.673.944	64,00	85.785.890	99,87		109.520	
			- <i>Belanja Bahan baku Bangunan</i>	6.011.946	6.011.946	100,00	6.011.946	100,00		-	

	1	-	Belanja ATK	18.383.464	18.273.944	81,45	18.273.944	99,40		109.520
		-	Belanja Jasa Pelayanan Umum	24.000.000	18.400.000	68,33	24.000.000	100,00		-
		-	Belanja UPS	5.000.000	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00		-
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.500.000	32.000.000	76,92	32.500.000	100,00		-
		-	Belanja Honorarium Peserta Sosialisasi		-	-				-
10			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>24.352.015</b>	<b>24.352.015</b>	-	<b>24.352.015</b>	<b>100,00</b>		-
	1	-	Belanja ATK	4.001.415	4.001.415	-	4.001.415	100,00		-
		-	Belanja Pengandaan	1.350.600	1.350.600	-	1.350.600	100,00		-
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	100,00		-
		-	Belanja Honorarium Peserta Sosialisasi	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	100,00		-
11			<b>Koordinasi Upaya Penyenggeraan Kententraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>78.846.976</b>	<b>78.142.500</b>	55,69	<b>78.756.250</b>	<b>99,88</b>		<b>90.726</b>
		-	Belanja Honorarium	10.000.000	10.000.000	70,00	10.000.000	100,00		-
	1	-	Belanja Premium	28.846.976	28.842.500			99,98		

Rencana Kerja (Renja) Kec. Praya Barat Daya Tahun 2023

						74,90	28.842.500			4.476	
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000	39.300.000	55,75	39.913.750	99,78	86.250
					<b>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,00</b>	-
				-	Belanja Bahan Bahan lainnya	2.700.000	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	-
				-	Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00	-
							-	-			
					<b>Pembinaan Kerukunan Antar Suku</b>	<b>194.951.397</b>	<b>194.852.400</b>	<b>100,00</b>	<b>194.852.400</b>	<b>99,95</b>	<b>98.997</b>
				-	Cetak Sapanduk	1.003.600	1.003.600	100,00	1.003.600	100,00	-
				-	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	72.148.797	72.049.800	100,00	72.049.800	99,86	98.997
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.025.000	41.025.000	100,00	41.025.000	100,00	-
				-	Belanja Pakain MTQ	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	-
				-	Belanja Sewa	25.774.000	25.774.000	100,00	25.774.000	100,00	-
				-	Belanja Sosialisasi	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	-

Rencana Kerja (Renja) Kec. Praya Barat Daya Tahun 2023

				- <i>Belanja Hadiah</i>	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	-	
						0					
						0					
						0					
						-					
						-					
						-					
				<b><i>Penanganan Konflik Sosial</i></b>	<b>20.580.000</b>	<b>20.580.000</b>	<b>78,13</b>	<b>20.580.000</b>	<b>100,00</b>	-	
				- <i>Belanja Premium</i>	2.580.000	2.580.000	100,00	2.580.000	100,00	-	
				- <i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	18.000.000	18.000.000	75,00	18.000.000	100,00	-	
						-					
						-					
12				<b><i>Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</i></b>	<b>51.615.300</b>	<b>49.365.300</b>	<b>80,03</b>	<b>51.615.300</b>	<b>100,00</b>	-	
		1		<b><i>Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i></b>		-	-			-	
				- <i>Belanja Premium</i>	29.115.300	29.115.300	67,36	29.115.300	100,00	-	
				- <i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	22.500.000	20.250.000			100,00		

				<i>Rapat</i>			100,00	22.500.000			-	
	13			<b><i>Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i></b>	<b>28.950.000</b>	<b>26.450.000</b>	<b>65,87</b>	<b>28.950.000</b>	<b>100,00</b>		-	
		1		- <i>Belanja Premium</i>	6.450.000	6.450.000	100,00	6.450.000	100,00		-	
				- <i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	22.500.000	20.000.000	100,00	22.500.000	100,00		-	
				- <i>Belanja Honorarium Peserta Sosialisasi</i>		-	-				-	
											-	
					2.429.692.144	2.214.656.398	91,15	2.367.996.724	97,46		61.695.420	

## **b) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Tugas pokok Kecamatan Praya Barat Daya kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Praya Barat Daya mempunyai fungsi;

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa.

## **c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi**

Secara umum di Kecamatan Praya Barat Daya yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan merupakan SKPD yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,



menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktifitas masyarakat;

2. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
3. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang. Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha . Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Komitmen dalam kebijakan dan rencana aksi program Potensi Andalan Setempat (PAS) yang berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program PAS diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.

#### **d) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Kec. Praya Barat Daya Tahun 2023

SKPD Kecamatan Praya Barat Daya berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Praya Barat Daya.

Prioritas pembangunan di Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 pada prinsipnya diarahkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dari sisi ekonomi dan industri. Hal ini mengingat letak geografis Kecamatan Praya Barat Daya yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah termasuk kawasan pertanian (Agrowisata) dan potensi pengembangan wilayah sebagai kawasan wisata alam, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pariwisata di Kecamatan Praya Barat Daya.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan good governance and akuntabilitas public.

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2021 “ Memacu Investasi Melalui Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

Peranan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Praya Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **a. Tujuan**

Tujuan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implemementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat yang professional;
2. Meningkatkan kemandirian desa;
3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif.

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Praya Barat Daya dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan;
2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas;
3. Meningkatkan Pelayanan Kecamatan;
4. Meningkatkan kualitas administrasi desa/kelurahan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Untuk tahun 2023, Program dan kegiatan yang direncanakan dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- e. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
- 8. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
  - Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
- 10. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban
  - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- 11. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Desa
  - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Kerja Kantor Camat Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Tabel 4.1( Lampiran)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Batukliang Utara di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi.

Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Batukliang Utara sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023. Rencana Kerja Kecamatan Praya Barat Daya yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan, kepala seksi dan seluruh staf Kecamatan Praya Barat Daya demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Praya Barat Daya telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Darek, 14 Juli 2022

**CAMAT PRAYA BARAT DAYA**

**H. M RUMETAN, SH**  
NIP. 1966123119920311